

ABSTRAK

Kegiatan reklamasi yang tidak diatur didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria mengakibatkan kekaburan hukum. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji ketentuan hukum positif tertulis (perundang-undangan) dan ketentuan perjanjian yang diberlakukan pada peristiwa hukum tertentu (kongkret), yaitu dilakukan pengujian apakah perundang-undangan dan ketentuan hukum perjanjian telah diterapkan dengan baik dalam kegiatan reklamasi dan Perjanjian Kerjasama tersebut tersebut. Untuk itu perlu diteliti mengenai eksistensi tanah reklamasi dan perjanjian kerjasama. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan reklamasi dan perjanjian kerjasama harus mengkaitkan peraturan-peraturan yang berlaku demi mencapai kepastian hukum. Sehingga dalam kegiatannya dapat mencapai tujuan bersama yaitu untuk kemakmuran rakyat.

Kata kunci : reklamasi, perjanjian kerjasama

ABSTRACT

Reclamation activities that are not regulated in Law Number 5 of 1960 on Basic Agrarian Law lead to blurred. This research is aimed to examine the provisions of the written positive law (legislation) and the provisions of the treaties that apply to certain legal events (concrete), that to examine whether the laws and the provisions of the contract law have been applied properly in the reclamation activities and such Cooperation Agreement . Therefore, it is necessary to investigate the existence of land reclamation and cooperation agreement. This research uses statute approach, case study and conceptual approach. The results show that reclamation activities and cooperation agreements should link the applicable regulations to achieve legal certainty. So in its activities can achieve the common goal that is for the welfare of the people.

Keywords: reclamation, cooperation agreement